

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan Kabupaten Pandeglang dikelola berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Periode 2011-2016

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Pandeglang periode 2011-2016 dapat diukur dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam periode dimaksud. Berdasarkan data yang ada, menunjukkan bahwa terjadi trend positif yang ditandai oleh semakin meningkatnya realisasi penerimaan pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah. Namun apabila dicermati lebih mendalam, trend positif yang ditunjukkan oleh kinerja pendapatan daerah didominasi oleh semakin meningkatnya perolehan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara untuk pendapatan daerah yang berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) angkanya menunjukkan tren yang tidak stabil atau fluktuatif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal.

Kinerja pengelolaan belanja daerah Kabupaten Pandeglang periode 2011-2016 yang terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung, apabila dilihat dari perkembangan realisasi target belanja menunjukkan kinerja yang semakin baik. Akan tetapi apabila dilihat dari sisi penilaian laporan keuangan daerah menunjukkan kinerja yang belum baik menurut hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran 2015.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

A. Pendapatan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kelompok pendapatan terdiri atas beberapa komponen yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, terdiri atas :
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum; dan
 - c. Dana alokasi khusus.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri atas :
 - a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
 - d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Berdasarkan data yang ada, perkembangan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu tahun 2010-2015 dari sisi realisasi pendapatan daerah cenderung mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan ini hampir seluruhnya disumbang oleh naiknya penerimaan komponen dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima dari Pemerintah Provinsi. Sementara untuk realisasi pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan trend yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang belum mampu untuk mandiri dan masih memiliki tingkat ketergantungan yang besar terhadap pemerintah provinsi dan pusat. Perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2010-2015 tergambar dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel. 3.1
Pendapatan Daerah Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pandeglang

NO	URAIAN	TAHUN						Rata-rata Laju Pertumbuhan 2010-2015
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	PENDAPATAN DAERAH	936.796.136.406	1.220.626.366.292	1.345.730.831.850	1.541.836.433.848	1.747.029.494.546	2.053.895.687.540	17,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.420.964.851	56.189.197.538	54.048.393.635	80.584.075.435	140.046.902.014	163.952.101.324	38,29
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.597.906.407	6.620.546.907	8.135.008.233	19.984.169.322	21.156.322.739	30.005.466.185	45,52
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.032.467.402	39.085.681.701	11.404.617.631	39.273.064.703	46.263.188.130	54.340.2705.29	26,11
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.974.116.334	6.442.033.783	6.627.403.885	7.550.463.547	8.886.221.784	8.049.312.935	0,19
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	2.816.474.708	4.040.935.147	27.881.363.886	13.776.377.863	63.741.169.361	71.526.222.930	90,98
								-
1.2	DANA PERIMBANGAN	832.302.075.070	870.685.657.118	1.057.315.528.442	1.196.360.134.581	1.265.554.543.584	1.294.374.747.080	9,23
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	46.133.884.626	49.940.070.204	64.606.977.790	57.945.552.660	53.440.432.189	45,082,406,382	(0,46)
1.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.740.131.644	4.981.045.914	7.055.557.652	8.016.885.921	7.010.033.395	10,458,626,698	43,15
1.2.3	Dana Alokasi Umum	695.077.858.800	723.981.841.000	880.790.323.000	988.536.476.000	1.077.077.628.000	1.107.070.138.000	9,76
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	89.350.200.000	91.782.700.000	104.862.670.000	141.861.220.000	128.026.450.000	131.763.576.000	8,08

Sumber : Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang

Tabel. 3.1
Pendapatan Daerah Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pandeglang (Lanjutan...)

NO	URAIAN	TAHUN						Rata-rata Laju Pertumbuhan 2010-2015
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72.073.096.485	293.751.511.636	234.366.909.773	264.892.223.832	341.428.048.948	595.568.839.136	52,56
1.3.1	Hibah		2.000.000.000	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat		-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya	22.185.096.485	30.384.813.356	40.292.912.773	44.722.619.832	76.512.974.948	93.699.478.136	33,39
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	38.158.000.000	245.366.698.280	155.073.997.000	204.652.604.000	237.091.054.000	415.175.821.000	61,19
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.730.000.000	16.000.000.000	39.000.000.000	15.517.000.000	26.926.020.000	86.693.540.000	49,19
1.3.6	Pendapatan lainnya			-	-	898.000.000	-	-

Sumber : Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang

B. Belanja Daerah

Perkembangan realisasi belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 3.2
Belanja Daerah Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pandeglang

NO	URAIAN	TAHUN						Rata-rata Laju Pertumbuhan 2010-2015
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
2	BELANJA DAERAH	932.811.194.285	1.177.455.206.188	1.266.816.384.126	1.530.136.053.814	1.640.017.295.719	2.037.028.432.385	16,91
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	724.398.986.125	777.417.084.505	868.145.392.392	994.258.379.283	1.070.503.763.342	1.350.212.295.831	13,26
2.1.1	Belanja Pegawai	651.892.511.018	724.368.478.539	824.225.954.046	903.607.151.521	1.006.703.140.507	1.062.828.829.279	10,27
2.1.2	Belanja Bunga	-	26.784.035	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	54.351.847.000	31.221.059.500	12.132.694.500	14.280.029.300	13.069.672.500	60.592.429.900	2,20
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.520.220.000	3.304.590.000	1.911.748.000	44.746.983.000	17.539.298.535	9.864.124.225	45,36
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.138.881.112	8.414.317.931	6.383.024.900	6.383.024.896	7.021.327.364	5.884.397.541	13,39
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kota dan Pemerintahan Desa	13.256.651.995	9.906.854.500	22.559.346.946	24.197.690.566	25.600.873.436	174.401.733.486	67,43
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	238.875.000	175.000.000	932.624.000	1.043.500.000	569.451.000	-	-
2.1.9	Dana Desa	-	-	-	-	-	36.640.781.400	-
2.2	BELANJA LANGSUNG	208.412.208.160	400.038.121.683	398.670.991.734	535.877.674.531	569.513.532.377	686.816.136.554	26,94
2.2.1	Belanja Pegawai	42.270.766.880	62.682.789.065	52.560.662.800	69.587.494.503	54.629.314.380	1.036.072.000	(52,37)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.944.182.068	168.929.872.578	205.150.247.373	197.510.767.759	223.601.740.253	367.429.671.243	32,21
2.2.3	Belanja Modal	75.197.259.212	168.425.460.040	140.960.081.561	268.779.412.269	291.282.477.744	318.350.393.310	33,46
								-
	SURPLUS/(DEFISIT)	3.984.942.121	43.171.160.104	78.914.447.724	11.700.380.034	107.012.198.827	16.867.255.155	33,45

Sumber : Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang

C. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan, meliputi :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
 - f. Penerimaan Piutang Daerah.

Pada tahun 2010 penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 38.150.969.704,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun 2009 sejumlah Rp. 38.150.969.704,-. Sementara pada tahun 2013 penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 82.870.400.692 yang berasal dari SiLPA tahun 2012. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA selama periode tahun 2010-2015 terus meningkat, dengan rata-rata laju pertumbuhan 2010-2015 sebesar 33,94 persen per tahun. Adapun Rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2015 tersaji dalam Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Pembiayaan Daerah Tahun 2010 - 2015
Kabupaten Pandeglang

NO	URAIAN	TAHUN						Rata-rata Laju Pertumbuhan 2010-2015
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
3	PEMBIAYAAN	38.150.969.704	39.640.883.682	79.870.404.844	152.784.852.568	164.485.232.602	271.497.431.429	48,06
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.150.969.704	41.800.883.682	82.870.400.692	158.784.852.568	164.485.232.602	271.497.431.429	48,06
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	38.150.969.704	41.562.372.332	82.870.400.692	158.784.852.568	164.485.232.602	271.497.431.429	48,06
3.1.2	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	238.511.350	-	-	-	-	-
								-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	2.160.000.000	2.999.995.848	6.000.000.000	-	-	-
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah	-	2.160.000.000	2.999.995.848	6.000.000.000			-
3.3	Pembiayaan Netto	38.150.969.704	39.640.883.682	79.870.404.844	152.784.852.568	164.485.232.602	271.497.431.429	48,06
3.4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	42.135.911.825	82.812.043.786	158.784.852.568	164.485.232.602	271.497.431.429	288.364.686.584	46,91

Sumber : Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang

3.1.2 Neraca Daerah

Perkembangan kondisi aset Kabupaten Pandeglang dari tahun 2010-2015 terus mengalami fluktuasi. Adapun gambaran lengkap perkembangan kondisi aset Kabupaten Pandeglang tahun 2010-2015 tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.
Neraca daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2015

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	41,494,277,128	82,789,388,424.00	158,731,249,017.00	164,470,082,433.00	267,883,914,923.24	279,956,084,197.45
Kas di Bendahara Pengeluaran	52,626,304	81,125,462.00	7,163,075.00	111,033,776.00	123,092,456.00	27,174,412.00
Kas di Bendahara Penerimaan	505,411	15,468,900.00	46,440,476.00	31,044,000.00	5,400,500.00	13,990,500.00
Piutang Pajak	1,080,403,740	1,557,822,470.00	4,328,730,302.47	92,764,987,303.00	96,286,240,216.00	100,192,130,735.00
Piutang Retribusi	261,500,000	-	-	4,759,824,456.14	2,117,529,900.00	8,694,277,200.00
Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan / TGR	77,996,593	3,822,955,831.80	3,859,068,043.00	2,585,425,359.38	206,777,332,438.00	216,850,000.00
Piutang Lainnya	508,335,281	5,487,686,389.69	496,772,307.00	807,222,639.33	4,289,300,711.00	2,373,209,457.00
Persediaan	11,661,334,826	11,922,512,912.67	18,608,641,950.00	27,437,907,867.60	19,095,317,766.00	23,713,115,567.00
Jumlah Aset Lancar	55,136,979,283	105,676,960,390.16	186,078,065,170.47	292,967,527,834.45	596,578,128,910.24	415,186,832,068.45
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Nonpermanen						
Investasi Nonpermanen Lainnya	-	500,000,000.00	500,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00	-
Jumlah Investasi Nonpermanen		500,000,000.00	500,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00	-
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	32,827,840,189	35,525,289,714.81	42,986,923,016.65	48,986,923,016.65	-	-
Pinjaman Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Permanen		35,525,289,714.81	42,986,923,016.65	48,986,923,016.65	-	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	32,827,840,189	36,025,289,714.81	43,486,923,016.65	48,986,923,016.65	480,000,000.00	-
Tanah	279,572,198,455	280,622,097,405.00	284,597,995,405.00	287,398,040,155.00	312,748,408,956.00	251,298,333,686.79
Peralatan dan Mesin	235,160,502,314	278,223,464,949.00	315,459,701,258.00	317,350,559,069.78	355,901,378,957.78	413,952,921,488.78
Gedung dan Bangunan	438,313,890,304	459,833,805,471.00	568,952,261,872.00	790,231,628,492.00	937,345,568,497.95	1,028,574,687,239.29
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	290,161,767,821	354,614,069,996.00	404,481,202,261.00	551,403,270,419.00	719,797,806,643.00	854,272,593,912.00
Aset Tetap lainnya	201,724,147,777	223,250,839,902.00	83,174,162,859.00	86,480,437,679.00	89,490,488,780.32	98,369,571,109.32
Konstruksi dalam Pengerjaan	3,682,911,849	10,775,244,550.00	20,177,909,605.00	18,141,069,526.00	6,185,005,681.00	36,113,636,717.10
Jumlah Aset Tetap	1,448,615,418,520	1,607,319,522,273.00	1,676,843,233,260.00	2,051,005,005,340.78	2,421,468,657,516.05	2,682,581,744,153.28
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dana Cadangan						
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	2,950,086,110.62
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
Aset Lain-lain	27,967,842,929	28,371,840,577.00	30,616,654,817.00	37,145,001,685.00	38,477,422,918.00	41,499,445,067.00
Jumlah Aset Lainnya	27,967,842,929	29,071,840,577.00	31,316,654,817.00	37,845,001,685.00	39,177,422,918.00	44,449,531,177.62
TOTAL ASET	1,564,548,080,921	1,778,093,612,955	1,937,724,876,264.12	2,430,804,457,876.88	3,057,704,209,344.29	1,564,548,080,921
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA						

PEDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	-	-	-	86,803,607.00	79,541,911.00	24,777,747.00
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lmbg Keu Bank	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	38,085,000.00	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	124,888,607.00	79,541,911.00	24,777,747.00
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	-	124,888,607.00	79,541,911.00	24,777,747.00
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	41,546,903,432	82,870,513,886.00	158,738,412,092.00	164,456,227,602.00	-	-
Pendapatan yang Ditangguhkan	505,411	15,468,900.00	46,440,476.00	929,044,000.00	-	-
Cadangan Piutang	1,928,235,614	10,868,464,691.49	8,684,570,652.47	100,917,459,757.85	-	-
Cadangan Persediaan	11,661,334,826	11,922,512,912.67	18,608,641,950.00	27,437,907,867.60	-	-
Dana YHD untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	55,136,979,283	105,676,960,390.16	186,078,065,170.47	293,740,639,227.45	-	-
EKUITAS DANA INVESTASI						
Diiinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	34,284,790,689	36,025,289,714.81	43,486,923,016.65	49,466,923,016.65	-	-
Diiinvestasikan dalam Aset Tetap	1,448,615,418,520	1,607,319,522,273.00	1,676,843,233,260.00	2,051,005,005,340.78	-	-
Diiinvestasikan dalam Aset Lainnya	31,210,745,529	34,298,348,177.00	36,984,070,001.00	44,449,781,869.00	-	-
Dana YHD untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1,514,110,954,738	1,677,643,160,164.81	1,757,314,226,277.65	2,144,921,710,226.43	-	-
EKUITAS DANA CADANGAN						
Diiinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA	1,569,247,934,021	1,783,320,120,554.97	1,943,392,291,448.12	2,438,662,349,453.88	1,877,090,029,917.28	2,225,353,721,707
Total Kewajiban dan Ekuitas Dana	1,569,247,934,021	1,783,320,120,554.97	1,943,392,291,448.12	2,438,787,238,060.88	1,877,169,571,828.28	2,225,378,499,454

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Periode 2010-2015

Pengelolaan keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta berdasarkan skala prioritas yang memenuhi kriteria realistis, terukur, penting dan mendesak sehingga anggaran yang terbatas tersebut dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran Kabupaten Pandeglang periode tahun 2010-2015 di dominasi oleh pemenuhan belanja pegawai atau belanja aparatur yang terdiri atas:

- a. Belanja Tidak Langsung, di antaranya:
 1. Belanja gaji dan tunjangan
 2. Belanja tambahan penghasilan
 3. Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH
- b. Belanja Langsung, di antaranya
 1. Belanja honorarium PNS
 2. Belanja beasiswa pendidikan PNS
 3. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
 4. Belanja makanan dan minuman pegawai
 5. Belanja pakaian dinas dan atributnya
 6. Belanja perjalanan dinas
 7. Belanja perjalanan pindah tugas
 8. Belanja pemulangan pegawai
 9. Belanja modal

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Pandeglang

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentasi
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2010	651.892.511.018	932.811.194.285	69,88
2	Tahun Anggaran 2011	724.368.478.539	1.179.615.206.188	61,41
3	Tahun Anggaran 2012	824.225.954.046	1.269.816.379.974	64,91
4	Tahun Anggaran 2013	903.607.151.521	1.536.136.053.814	58,82
5	Tahun Anggaran 2014	1.006.703.140.507	1.640.017.295.719	61,38
6	Tahun Anggaran 2015	1.005.780.493.457	1.640.023.747.719	61,33

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang

A. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam pengelolaan belanja daerah Kabupaten Pandeglang kurun waktu tahun 2010-2015, terdapat beberapa permasalahan mendasar diantaranya :

1. Adanya kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja setiap tahunnya, hal ini tercermin dari selisih antara jumlah usulan anggaran pada setiap musrenbang dengan pagu indikatif yang ada.
2. Adanya ketergantungan yang besar terhadap Pemerintah Provinsi dan Pusat, yang tercermin dari perbedaan yang mencolok antara pendapatan yang berasal dari transfer Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Keterbatasan sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
4. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, sehingga dana yang tersedia untuk alokasi belanja pembangunan menjadi terbatas.
5. Belanja daerah belum mampu menggerakkan ekonomi lokal dan sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan output perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat.

6. Pengeluaran belanja daerah belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik.

B. Latar Belakang Terjadinya Permasalahan

Latar belakang terjadinya permasalahan seperti yang diuraikan diatas adalah dikarenakan oleh ketergantungan pemerintah daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam hal pendanaan. Hal ini terjadi karena Pemerintah daerah belum mampu menggali potensi –potensi lokal yang bisa dikembangkan menjadi satu basis ekonomi daerah yang kuat, padahal dengan ekonomi lokal yang berkembang dan kuat, sudah barang tentu akan memberi sumbangan yang signifikan dalam pos Pendapatan Asli Daerah.

- C. Potensi dan tantangan perkembangan kedepan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional.

Adanya isu-isu strategis yang mengemuka secara perspektif nasional maupun regional, tentu harus disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, isu-isu tersebut diantaranya adalah adanya rencana pemberlakuan perdagangan bebas Asia yang apabila tidak disikapi dengan kebijakan yang tepat, maka akan berdampak buruk bagi perekonomian daerah. Selain isu tersebut, adanya rencana pembangunan infrastruktur berupa jalan tol Serang-Panimbang dan pembangunan bandara perintis Panimbang tentu akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian daerah yang pada akhirnya akan menambah sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan kecenderungan yang ditunjukkan oleh hasil analisa terhadap laju pertumbuhan pendapatan tahun 2010-2015 pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (komponen lainnya dianggap konstan) maka didapat angka proyeksi/prediksi pendapatan daerah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.
Perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021

KODE REK	URAIAN	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	176.855.995.843,21	189.759.890.362,42	202.663.784.881,63	215.567.679.400,84	228.471.573.920,05	241.375.468.439,26
4 2	DANA PERIMBANGAN	1.386.810.467.058,99	1.479.246.187.037,98	1.571.681.907.016,97	1.664.117.626.995,96	1.756.553.346.974,95	1.848.989.066.953,95
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	644.193.704.172,20	692.818.569.208,40	741.443.434.244,60	790.068.299.280,80	838.693.164.317,00	887.318.029.353,20
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.207.860.167.074,40	2.361.824.646.608,80	2.515.789.126.143,20	2.669.753.605.677,60	2.823.718.085.212,00	2.977.682.564.746,40

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang

Demikian halnya dengan belanja daerah, prakiraan yang dilakukan adalah dengan menggunakan kecenderungan yang dihasilkan oleh hasil analisis terhadap laju pertumbuhan belanja tahun 2010-2015. Sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7.
Perkiraan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021

KODE REK	URAIAN	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.449.699.793.008,08	1.549.187.290.185,16	1.648.674.787.362,25	1.748.162.284.539,33	1.847.649.781.716,41	1.947.137.278.893,49
5 2	BELANJA LANGSUNG	758.160.374.066,32	812.637.356.423,64	867.114.338.780,95	921.591.321.138,27	976.068.303.495,59	1.030.545.285.852,91
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.207.860.167.074,40	2.361.824.646.608,80	2.515.789.126.143,20	2.669.753.605.677,60	2.823.718.085.212,00	2.977.682.564.746,40

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang